

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat di Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERPRES No. 82 Tahun 2018, PERMENKES No. 37 Tahun 2012, PERMENKES No. 15 Tahun 2013, PERMENKES No. 39 Tahun 2016, PERMENKES No. 44 Tahun 2016, PERMENKES No. 11 Tahun 2017, PERMENKES No. 27 Tahun 2017, PERMENKES No. 31 Tahun 2018, PERMENKES No. 52 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018, PERMENKES No. 43 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No. 8 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No. 62 Tahun 2019, PERBUP BOGOR No. 9 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pertimbangan Daerah dapat membentuk Puskesmas adalah untuk: pemerataan beban kerja; keterjangkauan layanan kesehatan pada wilayah kerja; ketersediaan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium klinik. Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi: paradigma sehat; pertanggungjawaban wilayah; kemandirian masyarakat; ketersediaan akses pelayanan kesehatan; teknologi tepat guna; keterpaduan dan kesinambungan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 21 Januari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2022.
- Penjelasan: 147 hlm.